

DEFISIT APBN DAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA KRISIS

Haryo Kuncoro

Universitas Negeri Jakarta
haryokuncoro@ymail.com

Abstract

This research attempts to analyze the impact of deficit fiscal policy on the private expenditure in the case of Indonesia over the post crisis 2000-09 periods. The analysis is based on the goods market equilibrium. The approach is designed to analyze whether the government expenditure crowds out the private expenditure. In order to reach the objective of the study, this research used the Linear Expenditure System (LES) and compared to the Almost Ideal Demand System (AIDS). The estimation result of quarterly data shows that the government expenditure did not crowd out the private expenditure. The crowding out only occurs partially especially on the private investment. However, the government expenditure totally remains stimulating the private expenditures. This, in turn, leads to increase the gross domestic product. Those results indicate that the expansionary fiscal policy effectively affects to the economic growth especially after economic crisis in 1997. Even, the income elasticity was much greater than that in the pre-crisis periods.

Keywords: Deficit; Consumption; Investment; Government Expenditure; Crowding Out

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal defisit pengeluaran pribadi dalam kasus Indonesia selama pasca krisis periode 2000-09. Analisis ini didasarkan pada keseimbangan pasar barang. Pendekatan ini dirancang untuk menganalisis apakah pengeluaran pemerintah akan mengeluarkan pengeluaran swasta. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan Sistem Pengeluaran Linear (LES) dan dibandingkan dengan Hampir Ideal Demand System (AIDS). Hasil estimasi data kuartalan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak meng-crowd out pengeluaran swasta. Proses mengeluarkan hanya terjadi sebagian terutama pada investasi swasta. Namun, pengeluaran pemerintah benar-benar tetap menstimulasi pengeluaran swasta. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan peningkatan produk domestik bruto. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif efektif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama setelah krisis ekonomi pada tahun 1997. Bahkan, elastisitas pendapatan jauh lebih besar dari pada di periode pra-krisis.

Kata Kunci: Defisit; Konsumsi; Investasi; Pengeluaran Pemerintah; Crowding Out

Diterima: 8 April 2013; Direvisi: 8 Juni 2013; Disetujui: 11 Juni 2013

PENDAHULUAN

Isu mengenai sustainabilitas fiskal ini merupakan bagian integral dari pembahasan mengenai kemampuan jangka panjang pemerintah dalam membayar utang (*solvency*). Untuk menjaga solvensi fiskal, keuangan negara harus surplus (Chalk dan Hemming, 2000). Problem utama kelangsungan APBN adalah masih adanya defisit anggaran. Persoalannya adalah bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit tersebut masih dapat dicarikan pembiayaannya. Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Terjadinya krisis fiskal yang tidak diantisipasi dengan seksama akan membebani anggaran dan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi. Krisis fiskal yang terjadi pada negara-negara maju akan menimbulkan beban pada anggaran dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada negara-negara berkembang implikasinya lebih berat. Terjadinya krisis fiskal tidak hanya membebani anggaran tetapi juga akan menjalar dengan cepat pada perekonomian secara keseluruhan, mendorong pelarian modal (*capital outflow*), dan bahkan mengubah arah pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pada negara-negara berkembang dengan kelembagaan ekonomi yang masih lemah, ekspektasi terjadinya krisis fiskal akan mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi kendati risiko fiskal tersebut belum terjadi sesungguhnya (Barnhill dan Kopits, 2003).

Paper ini berupaya mengkaji reaksi perilaku agen-agen ekonomi terhadap kebijakan defisit yang diimplementasikan pada belanja pemerintah dengan kasus Indonesia. Untuk sampai pada target tersebut, pada awalnya tinjauan konseptual defisit fiskal akan diulas. Bagian berikutnya menyajikan studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Metode penelitian diuraikan pada bagian keempat. Hasil estimasi empirik ditampilkan pada bahasan di bawahnya. Akhirnya, paper ini akan ditutup dengan beberapa catatan.

Secara sederhana, defisit fiskal terjadi manakala belanja lebih besar daripada penerimaan. Dengan demikian, defisit bisa dihilangkan dengan pemangkasan belanja dan/atau peningkatan penerimaan. Dalam hal defisit menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari, pembiayaan dilakukan dengan opsi pencetakan uang atau utang (domestik/luar negeri). Pembiayaan defisit guna mengejar target belanja melalui

pencetakan uang (*seignorage*) membawa dampak pada peningkatan jumlah uang beredar. Konsekuensinya, inflasi menjadi tidak terkendali. Pengalaman pemerintahan Orde Lama pada tahun 1960-an menjadi bukti sahih yang memberi pelajaran berharga betapa mahalnnya ongkos yang harus dibayar (Glassburner, 1979; Snyder, 1985).

Sejak krisis, pemerintah Indonesia selalu menerapkan kebijakan defisit. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang pada periode sebelumnya mencapai minus 13 persen. Volume anggaran pemerintah senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 1999, misalnya, volume belanja pemerintah mencapai 232 trilyun rupiah dan pada tahun 2009 meningkat hingga mencapai lebih dari 1.037 trilyun rupiah. Selama periode yang sama, pertumbuhan nilai defisit anggaran mencapai 7 persen pertahun.

Dalam kasus ekonomi Indonesia pasca krisis, pemerintah membiayai defisitnya dengan fokus pada utang dalam negeri. Utang dari luar negeri masih tetap dipergunakan dengan sasaran penurunan peran dan proporsinya. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum, serta kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pinjaman luar negeri pemerintah berasal dari lembaga keuangan internasional, kreditor bilateral, serta kredit ekspor. Jenis pinjaman yang diperoleh berupa pinjaman program dan pinjaman proyek. Pinjaman program diperuntukkan bagi dukungan anggaran dan pencairannya dikaitkan dengan matrik kebijakan pencapaian *Millenium Development Goals* (kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim dan infrastruktur. Pinjaman proyek digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor seperti perhubungan dan energi serta proyek pengentasan kemiskinan (PNPM).

Perhatian terhadap utang dan defisit memiliki arti penting dalam analisis keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan karena defisit yang dibiayai dengan surat utang akan menimbulkan efek *crowding-out*. Menurut aliran Neoklasik, pinjaman yang dilakukan pemerintah terhadap publik akan berakibat pada berkurangnya investasi swasta. Hal

ini disebabkan penurunan cadangan dana publik yang akan diikuti oleh meningkatnya tingkat bunga. Dengan biaya modal yang tinggi, investasi swasta menjadi tertekan dan pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Defisit fiskal juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Mankiw (2003) mencatat efek yang dapat ditimbulkan oleh ekspansi anggaran pemerintah yang terlampau eksemif adalah terjadinya pelarian modal (*capital flight*) ke luar negeri. Dalam jangka pendek, defisit yang dibiayai dengan utang luar negeri dan juga utang dalam negeri beban ekonominya bisa berakumulasi menjadi semakin besar. Konsekuensinya, dalam jangka panjang, akan timbul pergeseran beban utang ke generasi yang akan datang.

Defisit memang tidak selalu membawa efek negatif pada perekonomian. Aliran Keynesian beranggapan bahwa kebijakan fiskal ekspansif akan merangsang optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber ekonomi sehingga tidak akan menurunkan output nasional (Eisner, 1989). Sementara itu, pendekatan ekuivalensi Ricardian meyakini bahwa ekspansi anggaran pemerintah tidak ada pengaruh apapun (netral) terhadap pertumbuhan ekonomi (Barro, 1974).

Secara ringkas, dampak ekspansi belanja pemerintah terhadap perekonomian sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah (Saleh, 2002): pertama, sampai seberapa besar proporsi dari belanja pemerintah diserap kembali ke kas negara untuk membayar kembali kewajiban hutang dan bunga pinjaman. Kedua, sampai seberapa besar proporsi belanja pemerintah tersebut ditujukan untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan. Pembiayaan belanja pemerintah tersebut pada akhirnya akan membawa pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dan hutang luar negerinya di masa mendatang.

Untuk kasus Indonesia, studi mengenai topik yang sama belum banyak dilakukan. Studi yang pernah dilakukan pada umumnya masih bersifat parsial. Ikhsan dan Basri (1991) mengungkap ketidakberadaan fenomena *crowding out*. Dengan mempergunakan gabungan model akselerator pertumbuhan ekonomi antara Neoklasik dan Keynesian, Ikhsan dan Basri menunjukkan bahwa ekspansi belanja pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan investasi swasta. Hubungan tersebut lebih bersifat komplementer yang berarti sektor swasta merespon positif terhadap aktivitas sektor pemerintah.

Hasil di atas sejalan dengan studi Adjie (1995). Adjie mencoba menunjukkan eksistensi *crowding out* berdasarkan sumber pembiayaannya. Dua sumber pembiayaan yang dipertentangkan adalah hutang publik dan pajak. Dengan mengaplikasikan model konsumsi, ia menyimpulkan bahwa kedua sumber pembiayaan belanja pemerintah tersebut tidak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi secara makro tidak mengalami koreksi.

Pada tulisan selanjutnya, Adjie (1996) mencoba menelaah fenomena *crowding out* melalui mekanisme jalur suku bunga. Dalam studinya Adjie mengestimasi hubungan antara defisit anggaran pemerintah dengan tingkat bunga riil Indonesia. Hasil estimasinya menyimpulkan kebijakan ekspansi anggaran tidak berpengaruh nyata pada pergerakan tingkat bunga. Mengingat suku bunga merupakan harga dari investasi, implikasinya kegiatan investasi swasta tidak mengalami penurunan dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh.

Kuncoro (2000) memperoleh fakta empirik kebijakan defisit yang dibiayai dari utang luar negeri mendesak keluar (*crowd out*) investasi swasta yang membawa konsekuensi pada minimnya peran utang luar negeri pada pertumbuhan ekonomi. Saleh (2002) meneliti peran utang luar negeri dalam perekonomian Indonesia dengan hasil yang juga negatif. Nihilnya kontribusi utang disebabkan karena utang luar negeri tidak cukup mampu menciptakan penerimaan dalam negeri.

Studi-studi di atas yang mengamati dampak aktivitas fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum cenderung mendukung paradigma Keynesian. Kendati demikian, beberapa perbedaan karakteristik yang berlaku umum dapat diidentifikasi. Pertama, mereka menelaah dampak defisit pada masa sebelum krisis. Kedua, mereka menspesifikasikan ekspansi anggaran pemerintah dengan berbagai macam konsep atas dasar kepentingan masing-masing.

Ikhsan dan Basri (1991) melokalisasi ekspansi anggaran yang khusus dialokasikan pada investasi pemerintah. Sementara Adjie (1996) memfokuskan ekspansi anggaran pada konsep ekspansi anggaran keseluruhan. Bahkan Adjie (1995) menjeneralisasi ekspansi fiskal ke dalam anggaran belanja pembangunan.

Chand (1977) dan Chelliah (1978) mengemukakan beberapa konsep pengukuran ekspansi anggaran. Masing-masing konsep pengukuran akan memberikan indikator defisit anggaran yang berbeda-beda pula. Untuk kasus Indonesia, dalam hal ekspansi

anggaran dibiayai dari sumber keuangan dalam dan luar negeri, maka konsep pengukuran ekspansi fiskal yang mengacu pada konsep nilai tambah dan saldo domestik cenderung lebih tepat (Booth dan McCawley, 1983). Mengikuti konsep ekspansi anggaran nilai tambah, anggaran pemerintah perlu dibedakan ke dalam rekening lancar dan rekening modal. Dari kedua jenis rekening tersebut, selanjutnya dibedakan lagi dampaknya terhadap produk domestik bruto dan neraca pembayaran luar negeri. Dari identifikasi antara kedua dampak ekonomi ke dalam dan ke luar tersebut akan diperoleh saldo defisit anggaran domestik.

METODE

Penelitian ini mencoba menelaah dampak kebijakan ekspansi anggaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kasus yang diambil sebagai objek penelitian adalah Indonesia untuk periode 2000-2009 dengan data kuartalan. Analisis dampak kebijakan ekspansi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi akan didekati dari keseimbangan di pasar barang domestik:

$$Y = C + I + G \dots\dots\dots (1)$$

Dampak kebijakan defisit yang termanifestasi pada ekspansi anggaran pemerintah (G) terhadap pendapatan nasional (Y) dapat diidentifikasi dari responsivitas belanja sektor swasta yaitu konsumsi rumah tangga (C) dan belanja investasi (I). Model responsi ini didasarkan pada asumsi ultra-rasionalitas yang diajukan oleh David dan Scadding (1974). Ultra-rasionalitas sektor rumah tangga menyatakan bahwa sektor perusahaan dan pemerintah merupakan ekstensi dari sektor rumah tangga itu sendiri, sehingga belanja pemerintah dipandang sebagai substitusi dari belanja sektor swasta.

Dengan asumsi tersebut penelitian ini mencoba menggunakan model estimasi sistem permintaan LES (*Linear Expenditure System*). Spesifikasi model tersebut telah ekstensif digunakan dalam ekonomi mikro khususnya untuk mengestimasi sistem permintaan barang dengan anggaran yang terbatas. Kemudahan yang terkandung dalam model ini adalah bahwa proses estimasi mudah dilakukan. Selain itu, keduanya tidak mensyaratkan data yang terperinci, sesuatu yang sangat jarang ditemui di negara sedang berkembang. Lebih lanjut, model ini sangat cocok diterapkan untuk data agregatif yang dipublikasikan untuk konsumsi umum yang tidak menampilkan karakteristik setiap pelaku ekonomi (Sadoulet dan de Janvry, 1995).

LES adalah persamaan sistem permintaan yang diturunkan dari fungsi utilitas Stone-Geary (Sadoulet dan De Janvry, 1995: 42):

$$U = \sum (q_i - c_i)^{b_i} \dots\dots\dots (2a)$$

$$U = \sum b_i [\ln (q_i - c_i)] \dots\dots\dots (2b)$$

dengan $0 < b_i < 1$; $\sum b_i = 1$; dan $q_i - c_i > 0$. Komponen c_i diinterpretasikan sebagai konsumsi minimum subsisten. Fungsi permintaan diderivasi dari maksimisasi fungsi utilitas persamaan di atas dengan kendala jumlah anggaran yang terbatas $Y = \sum p_i q_i$ dan diperoleh:

$$p_i q_i = c_i p_i + b_i (Y - \sum c_j p_j); i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots (3)$$

Dari persamaan (3) tersebut dapat diidentifikasi nilai b_i yang menunjukkan pangsa anggaran (*share*) marginal. Pangsa anggaran marginal menjelaskan belanja untuk masing-masing komoditas q_i sebagai akibat dari perubahan pendapatan. Nilai b_i ditentukan lebih besar dari 0, sehingga tidak memungkinkan untuk mencakup barang inferior. $\sum c_j p_j$ adalah belanja subsisten dan $(Y - \sum c_j p_j)$ diartikan sebagai *supernumerary* yang dibelanjakan pada proporsi tertentu b_i di antara komoditas yang ada. Elastisitas harga dan pendapatan dapat diperoleh dengan formula:

$$\varepsilon_{ii} = -1 + (1 - b_i) (c_i / q_i) \dots\dots\dots (4)$$

$$\varepsilon_{ij} = - (b_i c_j q_j) / (p_i q_i) \dots\dots\dots (5)$$

$$\varepsilon_{iY} = (b_i / s_i) \dots\dots\dots (6)$$

Kendati antara Y , p_i , dan q_i pada (3) mempunyai hubungan linier berpangkat 1, sistem persamaan LES tidak bisa diestimasi secara langsung dengan OLS (*Ordinary Least Squares*) klasik, mengingat sifat multiplikatif antara b_i dan c_j sehingga estimasinya harus dilakukan dengan NLLS (*Non Linear Least Squares*). Secara umum, metode estimasi NLLS merupakan metode iteratif. Dalam pendekatan ini, persamaan non linier dalam parameter dilinierisasikan dengan menggunakan beberapa nilai koefisien awal yang ditentukan secara arbitrer. Dengan estimasi OLS, persamaan tersebut akan menghasilkan nilai koefisien yang baru. Persamaan non linier dengan nilai parameter yang baru ini diestimasi kembali dengan OLS untuk memperoleh nilai estimasi yang lebih baru lagi. Prosedur ini dilakukan berulang-ulang sampai parameter yang diperoleh tidak berubah (stabil) untuk setiap proses iterasi.

Hal penting yang dapat ditarik dari sistem permintaan ini adalah bahwa LES merupakan implikasi dari fungsi linier Engle. Spesifikasi model tersebut kurang didukung oleh aspek empiris sehingga kemungkinan hanya bisa tepat pada tingkat

variasi Y dalam rentang waktu yang pendek. Apabila LES digunakan untuk estimasi ke depan, konsekuensinya hanya akan menghasilkan prediksi jangka pendek. Dengan alasan inilah, model LES akan disandingkan dengan model AIDS (*almost ideal demand system*) yang dikembangkan oleh Deaton dan Muellbauer (1980).

Model AIDS diderivasi dari suatu fungsi utilitas yang dispesifikasikan sebagai pendekatan derajat kedua (*second order approximation*) untuk setiap fungsi utilitas. Fungsi permintaan AIDS selanjutnya diturunkan ke dalam pangsa anggaran sebagai berikut:

$$(p_i q_i)/Y = s_i = a_i + \sum b_{ij} \ln p_j + c_i \ln (Y/P) \dots\dots\dots (7)$$

$$\sum a_i = 1; \sum b_{ij} = \sum b_{ji} = 0; \sum c_i = 0 \dots\dots\dots (8)$$

s_i adalah pangsa belanja barang q_i terhadap total anggaran, p_i adalah harga barang i , dan P adalah indeks harga yang didefinisikan sebagai:

$$\ln P = a_0 + \sum a_k \ln p_k + \frac{1}{2} \sum \sum b_{jk} \ln p_k \ln p_j \dots\dots\dots (9)$$

Deaton dan Muellbauer (1980) menyarankan pendekatan perhitungan terhadap indeks harga P dengan indeks harga geometrik Stone:

$$\ln P^* = \sum s_i \ln p_i \dots\dots\dots (10)$$

Pendekatan linier ini lebih baik apabila ada kolinieritas antar harga komoditi selama waktu tertentu. Persamaan AIDS lebih lanjut dapat dituliskan sebagai:

$$s_i = a_i^* + \sum b_{ij} \ln p_j + c_i \ln (Y/P^*) \dots\dots\dots (11)$$

dalam hal ini $a_i^* = a_i - c_i \ln \phi$ dan $P = \phi P^*$ yang merupakan pendekatan terhadap P .

Pendekatan linierisasi AIDS harus diestimasi sebagai satu sistem persamaan dengan restriksi-restriksi tertentu terhadap beberapa nilai parameternya. Elastisitas harga untuk barang i dan j serta elastisitas pendapatannya dapat diperoleh dari kalkulasi terhadap parameter-parameter yang diestimasi:

$$\varepsilon_{ij} = -1 + (b_{ij}/s_i) - c_i \dots\dots\dots (12)$$

$$\varepsilon_{ij} = (b_{ij}/s_i) - (c_i/s_i)s_j \dots\dots\dots (13)$$

$$\varepsilon_{iY} = 1 + (c_i/s_i) \dots\dots\dots (14)$$

Estimasi parameter-parameter pada sistem permintaan AIDS (persamaan 7) ditempuh dengan pendekatan SURE (*Seemingly Unrelated Regressions Estimation*) yang dikembangkan oleh Zellner (1962) agar diperoleh hasil estimasi yang efisien. Secara umum untuk mengestimasi SURE tersebut digunakan metode GLS (*Generalized Least Squares*) (Pyndick dan Rubenfield, 1991). Hasil estimasi SURE ini akan ekuivalen dengan metode MLE (*Maximum Likelihood Estimators*) (Greene, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi LES dan AIDS untuk ketiga persamaan di atas serta estimasi elastisitas harga dan pendapatannya untuk masing-masing komoditas disajikan berturut-turut pada Tabel 2 dan 3. Secara statistik hasil estimasi model persamaan struktural AIDS khususnya untuk konsumsi masyarakat memberikan hasil yang kurang memuaskan. Meskipun demikian, perhatian dan analisis tidak ditujukan pada hasil model struktural (Tabel 1). Koefisien yang mempunyai arti secara ekonomi adalah persamaan turunannya yang menunjukkan indeks elastisitas harga masing-masing komoditas dan pendapatan (Tabel 2).

Tanda arah koefisien yang diperoleh dari model sistem permintaan LES dan AIDS untuk masing-masing harga komoditas sudah sesuai dengan teori permintaan yang dijadikan basis referensi. Elastisitas harga terhadap masing-masing barang yang bersangkutan bernilai negatif. Nilai absolut dari ketiga indeks elastisitas tersebut sangat bervariasi. Elastisitas harga untuk kedua model masing-masing adalah -1.07 (-0.28), -0.47 (-0.31), dan -0.89 (-0.07) untuk C, I, dan G. Ini berarti bila terjadi kenaikan harga masing-masing barang sebesar 1 persen, jumlah barang konsumsi, investasi, dan barang pemerintah yang diminta akan menurun rata-rata sebesar persentase elastisitasnya. Dari ketiga indeks elastisitas tersebut dapat diidentifikasi bahwa barang investasi dan barang pemerintah merupakan barang normal (elastisitas lebih kecil dari 1), sedangkan barang konsumsi mempunyai kecenderungan sebagai barang yang sangat peka terhadap harga (elastisitas lebih besar dari 1).

Tabel 1. Hasil Estimasi Sistem Permintaan LES dan AIDS, 2000(1)-2009(4)

Model LES			Model AIDS		
Konsumsi	Koefisien	t-stat	Konsumsi	Koefisien	t-stat
c_0	-22984.36	-1.54293	a_0	4.95995	14.81953
b	0.15	5.76175	b_1	0.25420	20.68749
c_1	84713.29	0.95717	b_2	-0.16095	-19.12975
c_2	-71542.68	-0.57706	b_3	-0.09325 c	-4.77144 a
			c_1	-0.33736	-12.72396
Investasi			Investasi		
c_0	75635.32	9.40906	a_0	-0.47476	-1.00764
b	0.34	24.80331	b_1	-0.16095	-19.12975
c_1	276474.70	11.34533	b_2	0.18130	12.43363
c_2	51460.98	1.70745	b_3	-0.02035 c	-3.94610 b
			c_1	0.05515	1.48095
Pemerintah			Pemerintah		
c_0	6913.16	0.44694	a_0	-3.48519 d	-4.24430 a
b	0.51	24.11158	b_1	-0.09325 c	-4.77144 a
c_1	-230058.20	-8.53881	b_2	-0.02035 c	-3.94610 b
c_2	123593.70	6.24813	b_3	0.11360 c	0.77202 a
			c_1	0.28222 e	4.38082 a

Catatan:

- standard error diambil dari estimasi langsung antara pangsa C dan G
- standard error diambil dari estimasi langsung antara pangsa I dan G
- dihitung berdasarkan restriksi $\sum b_i = 0$
- dihitung berdasarkan restriksi $\sum a_0 = 1$
- dihitung berdasarkan restriksi $\sum c_1 = 0$

Tabel 2. Estimasi Elastisitas Harga dan Pendapatan Sistem Permintaan LES dan AIDS, 2000(1)-2009(4)

LES	C	I	G	Y
C	-1.07585	-0.36538	0.29362	0.22139
I		-0.47328	-0.24314	1.39865
G			-0.89941	6.08041
AIDS	C	I	G	Y
C	-0.28446	-0.11700	0.09663	0.49810
I		-0.31202	-0.10236	1.22604
G			-0.07220	4.36488

Sumber: Diolah dari tabel 1

Pada Tabel 2 ditampilkan pula elastisitas silang untuk ketiga jenis barang. Elastisitas silang antara barang pemerintah dengan barang konsumsi rumah tangga cenderung berhubungan positif. Sebaliknya, elastisitas harga antara barang pemerintah dengan barang investasi memperlihatkan tanda negatif. Sementara elastisitas antara konsumsi dengan investasi juga negatif. Tanda elastisitas silang yang negatif menunjukkan bahwa antara kedua barang yang bersangkutan berhubungan substitusi. Sementara tanda elastisitas silang yang positif menunjukkan bahwa antara kedua barang tersebut berhubungan komplementer.

Dari sisi rumah tangga, kenyataan ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan harga barang konsumsi, masyarakat akan mengurangi jumlah barang konsumsi yang diminta. Selanjutnya, penurunan konsumsi ini juga akan mengurangi jumlah barang pemerintah yang diminta. Dari sisi investor, kenaikan harga barang pemerintah cenderung akan mengurangi belanja investasinya. Hal yang sama juga terjadi apabila terjadi kenaikan barang konsumsi. Dari sini dapat disimak bahwa belanja investasi sangat ditentukan oleh ketersediaan barang konsumsi dan juga barang pemerintah.

Bukti empiris bahwa elastisitas harga silang antara barang pemerintah dengan barang konsumsi yang positif ini menunjukkan adanya fenomena *crowding in*. Sebaliknya bukti empiris bahwa elastisitas harga silang antara barang pemerintah dengan barang investasi yang negatif ini menunjukkan adanya fenomena *crowding out*. Secara makro kondisi ini disebut sebagai *partial crowding out*. Belanja pemerintah tidak seluruhnya mengurangi komponen belanja swasta. Sektor swasta merespon negatif hanya pada belanja investasinya.

Dampak perubahan pendapatan konsumen terhadap masing-masing jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh koefisien pada variabel Y. Koefisien pendapatan masyarakat pada komponen C, I, dan G tampak jauh berbeda. Secara umum peningkatan jumlah barang pemerintah yang diminta sebagai akibat kenaikan pendapatan adalah yang paling besar. Sementara peningkatan yang sama untuk barang konsumsi adalah yang paling rendah. Indeks elastisitas pendapatan yang positif ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam mengkonsumsi barang C, I, dan G bergerak di sepanjang garis ICC (*income consumption curve*).

Hasil di atas sangat berkebalikan dengan studi Kuncoro (2000) untuk kasus pada periode sebelum krisis. Koefisien elastisitas pendapatan terhadap permintaan belanja pemerintah selama periode sebelum krisis sangat kecil. Perbandingan antara hasil kedua studi ini menunjukkan bahwa kebijakan defisit setelah krisis relatif (yang lebih banyak dibiayai dari utang domestik) lebih berhasil mempengaruhi perekonomian dari pada sebelum krisis. Agen-agen ekonomi lebih lebih responsif terhadap kebijakan ekspansif pemerintah dalam menanggulangi krisis.

Tabel 3. Estimasi Elastisitas Harga dan Pendapatan Sistem Permintaan AIDS, 1969-1996

	C	I	G	Y
C	-0.92167	-0.17361	+0.08996	+1.00532
I		-0.57471	-0.04485	+1.30013
G			-1.47074	+0.28332

Sumber: Kuncoro (2000)

SIMPULAN

Temuan yang diperoleh adalah bahwa kebijakan ekspansif pada belanja pemerintah tidak menyebabkan terjadinya *crowding out* di pasar barang domestik. Desakan belanja pemerintah hanya terjadi secara parsial pada komponen belanja investasi (paradigma Neoklasik berlaku). *Crowding out* tidak terjadi atas belanja konsumsi masyarakat (paradigma Keynesian Berlaku). Secara totalitas, kebijakan ekspansi anggaran tersebut tetap meningkatkan belanja sektor swasta. Hasil di atas menyarankan keharusan adanya disiplin fiskal yang mengacu pada kebijakan kehati-hatian (*prudent policy*) agar tidak terjadi desakan terhadap belanja investasi swasta yang berlebihan. Implementasi kebijakan fiskal, oleh karenanya, perlu disesuaikan dengan situasi perekonomian makro agar terpelihara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, dalam upaya untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang, maka *policy mix* yang terkoordinasi dan konsistensi antara kebijakan fiskal dan moneter guna menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal menjadi strategi kunci dalam manajemen ekonomi makro.

Sebagai kata akhir perlu ditegaskan bahwa makalah ini hendaknya tidak dipandang sebagai dukungan terhadap kebijakan fiskal ekspansif yang telah ditempuh pemerintah. Defisit anggaran pemerintah memang tidak selamanya berdampak negatif bagi perekonomian seperti telah ditunjukkan oleh studi ini. Sungguh demikian, defisit anggaran yang berlebihan harus diakui merupakan satu masalah yang harus diperhatikan juga. Bagaimanapun pemerintah hendak meningkatkan belanja pembangunan guna menstimulasi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di saat pasca krisis, hendaknya tetap memperhatikan beban/akibat ekonomi yang akan dipikul oleh generasi mendatang.

PUSTAKA ACUAN

- Adjie, A.D. 1995. *Is Public Debt Neutral? Evidence for Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 10, No. 1: 21-34.
- Adjie, A.D. 1996. *Can Indonesia Sustain her Budget Deficits?: An Overview*. Ekonomi dan Industri, PAU Studi Ekonomi UGM, Vol. 3, No. 1: 69-83.
- Barro, R.J. 1989. *The Ricardian Approach to Budget Deficits*. Journal of Economic Perspectives, Vol. 3, No. 2: 37-54.
- Bernheim, B.D. 1989. *A Neoclassical Perspective on Budget Deficit*. Journal of Economic Perspectives, Vol. 3, No. 2: 55-72.
- Boediono. 2009. *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi*. Jakarta : KPG & Freedom Institute.
- Carroll, C. dan L.H. Summers. 1987. *Why Have Private Saving Rates in the United States and Canada Diverge?*. Journal of Monetary Economics, Vol. 20, No. 3, September: 249-79.
- Chelliah, R.J. 1978. *Significance of Alternative Concepts of Budget Deficit*. International Monetary Fund Staff Paper, Vol. 25, No. 3, November: 741-84.
- David, P.A. dan J.L. Scadding. 1974. *Private Saving: Ultrarationality, Aggregation, and Denison's Law*. Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 2, Maret/April: 225-49.
- Deaton, A. dan Muellbauer, J. 1980. *An Almost Ideal Demand System*. American Economic Review, Vol. 70, No. 3, Juni: 312-26.
- Eisner, R. 1989. *Budget Deficit: Rhetoric and Reality*. Journal of Economic Perspectives, Vol. 3, No. 2: 73-93.
- Glassburner, B. 1979. *Budgets and Fiscal Policy under the Soeharto Regime in Indonesia, 1966-78*. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. 27, No. 3, September: 295-314.
- Gramlich, E.M. 1989. *Budget Deficit and National Saving: Are Politicians Exogenous?* Journal of Economic Perspectives, Vol. 3, No. 2: 23-35
- Ikhsan, M. dan M.C. Basri. 1991. *Investasi Swasta dan Pemerintah; Substitusi atau Komplementer?: Kasus Indonesia*. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. 39, No. 4, Desember: 359-91.
- Klein, L. 1989. *International Debt of Developing Countries, Any Step toward Solution?* PIDS Development Research News, Vol. XIV, No. 1, 1987.
- Kuncoro, H. 2000. *Ekspansi Belanja Pemerintah dan Responsivitas Sektor Swasta*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Vol. 5, No. 1: 53-63.

- Mankiw, N. G. 2003. *Macroeconomics*, Edisi Kelima, USA : Worth Publishers.
- McKinnon, R.I. 1973. *Money and Capital in Development*, Washington, DC : The Brooking Institution.
- Saleh, S. 2002. *Pengaruh Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah terhadap Perekonomian Indonesia*, (Disertasi Tidak Dipublikasikan) Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Snyder,W. 1985. *The Budget Impact on Economic Growth and Stability in Indonesia*. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 33, No. 2, Juli: 21-34.
- Wray, L.R. 1989. *A Keynesian Presentation of Relations among Government Deficit, Investment, Saving, and Growth*. *Journal of Economic Issues*, Vol. 13, No. 4, Desember: 977-1002.